



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masuk dan bahan pertimbangan untuk analisis, usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24

RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2025, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Painan, 1 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima Tahun ke depan.

Rancangan awal perencanaan yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2024 dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika, yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 dan untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasikan secara optimal segala

partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	16	01	2.02		Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	34 Orang/bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	100%

						Tunjangan ASN								
2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	01	2.06		Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kenutuhan administrasi Umum								
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	7 Paket	7 Paket	100%
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	3 Paket	3 Paket	100%
2	16	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	60 Laporan	60 Laporan	100%
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	200 Laporan	200 Laporan	100%
2	16	01	2.08		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pelayanan umum kantor	12 Laporan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Unit	12 Unit	100%
2	16	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik									
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3000 Dokumen	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	3000 Dokumen	3000 Dokumen	100%
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	15 Dokumen	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
2	16	03			Program Aplikasi Informatika									
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan e government Pemda	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	5 Aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100%

						Elektronik yang Dikembangkan											
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan ekosistem	12 bulan	n/a	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
2	16	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Terselenggaranya statistik sektoral di pemda Pesisir Selatan											
2	16	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Tersedianya data statistik sektoral Pemda Pesisir Selatan	1 Dokumen	n/a	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	90 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	90 Orang	90 Orang	100%			
2	16	02	2.01	03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 OPD	n/a	n/a	n/a	n/a	46 OPD	46 OPD	100%			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggarakannya pengamanan persandi Pemda Kab.Pesisir Selatan											
2	21	02	2.01	03	Sub Keg Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi an Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

2	21	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	3 Dokumen	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.02.1.02.10.01.01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Kegiatan operasional perjalanan dinas kantor	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.15					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya pelayanan berbasis Teknologi informasi terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku	n/a	n/a	120 ASN	120 ASN	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.17					Program Fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tercapainya peningkatan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfaatan TIK Guna peningkatan kemampuan bekerja dan frmeningkatkan kesejahteraan	n/a	45 OPD dan 182 Nagari	45 OPD dan 182 Nagari	45 OPD dan 182 Nagari	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.18					Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tercapainya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kab. Pessel	n/a	3.060 Berita dan 45 Sub Website OPD	3000 Berita website, 120 artikel website dan 15 Media elektronik	3000 Berita website, 120 artikel website dan 15 Media elektronik	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.1.02.10.01.22					Program Pengamanan Informasi	Terlaksananya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a
1.02.14.1.02.10.01.15					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Terlaksananya ketersediaan informasi dan data statistik daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	n/a	n/a	n/a

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sebanyak 5 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 8.310.334.563,- (Delapan milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 8.037.063.784,00 (Delapan milyar tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu lima puluh tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 97%.

1. Program/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pelaksanaan pada sub kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
- b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

Pelaksanaan sub kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika , capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- Terpenuhiya layanan Akses Internet/Intranet untuk 45 Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Kecamatan/RSUD), 20 Puskesmas dan 1 RSUD Tapan dengan biaya Langganan Internet Dedicated layanan Akses Internet selama 1 (satu) tahun dengan 1 (satu) Penyedia Layanan;
Periode Layanan: Januari s.d Desember 2022 (12 Bulan)
Kapasitas BW : Icon + = 400 Mbps
Telkom = 150 Mbps
Broadband = 20 Mbps
- Metro-Ho 800 Mbps (67 titik lokasi/perangkat daerah/Puskesmas)
- Wifi Gratis di 13 Akses Point (Internet gratis) serta Internet Backup di 10 Lokasi.
- Tersedianya aplikasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang dibuat maupun yang dikembangkan terdiri dari 10 aplikasi baru dan 5 pengembangan aplikasi.
- Terlaksananya pengawasan Menara sebanyak 200 menara di Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan PAD bagi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan sebanyak Rp. 414.490.000,- (empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- PPID Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan juara 1 tingkat Propinsi Sumatera Barat. PPID Kabupaten Pesisir Selatan sudah lima kali berturut-turut menjadi juara 1 (Informatif).
- Terselenggaranya penyampaian pembangunan daerah Pesisir Selatan melalui Radio Langkisau FM maupun mobil keliling penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Terlaksananya penyampaian berita pembangunan daerah melalui media online sebanyak 19 Media dan terbinanya 121 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- 80 Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021
- 214 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2021
- 31 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha.
- 62 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- Pembuatan Tanda Tangan Digital yang ditargetkan sebanyak 150 ASN, dan capaian target terealisasi sebanyak 1.142 ASN

2. Program/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022

Untuk program/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

3. Program/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun 2022 dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga sub kegiatan dibawah ini tidak dapat dilaksanakan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dengan indikator Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Capaian kinerja : 3,42 kategori baik
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Capaian kinerja : 99 % kategori informatif
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

- Adanya refocusing anggaran sehingga ada 4 sub kegiatan yang dihilangkan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk teknis standard pelayanan minimal. Untuk Mencapai target standar pelayanan minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi,

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing, tableT-C.30

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi			3,34	3,35	3,55	3,55	3,34		3,35	3,55	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik			93	93	94	95	99		94	95	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen – elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita / informasi, penerima berita / informasi, substansi berita / informasi dan saluran berita / informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen – elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.
2. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.
3. Belum maksimalnya hasil kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.
4. Kurangnya maksimalnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan. Statistik sektoral

adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.

5. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan.
6. Substansi berita / informasi yang disampaikan masih kekurangan sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antara Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan informatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dari segala aspek pembangunan daerah. Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah. Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memasukkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan meningkatnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan efektifnya penerapan e government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan peningkatan Indeks SPBE

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024**

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMINFO	7 Dokumen	34,700,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMINFO	34 Orang/Bulan	3,415,731,00	APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISKOMINFO	12 Dokumen	123.240,00	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <u>Sub Kegiatan</u>					

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	7 Paket	10.496,00	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	7 Paket	240.600,00	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	4 Paket	30.000,00	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISKOMINFO	4 Paket	25.941,00	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Dokumen	5.400,00	APBD
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DISKOMINFO	60 Laporan	16.250,00	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	200 Laporan	125.325,00	APBD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Sub Kegiatan</u>					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISKOMINFO	2 Unit	50.000,00	APBD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u>					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	158.645,00	APBD
-					

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	76.570,00	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISKOMINFO	12 Unit	208.234,00	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISKOMINFO	1 Unit	23.660,00	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISKOMINFO	1 Unit	26.000,00	APBD
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah				
<u>Sub Kegiatan</u>					
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Pessel	12 Media	265.000,00	APBD
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Pessel	8000 Dokumen	190.761,00	APBD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Pessel	15 Dokumen	265.306,00	APBD

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan Pengelolaan e government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan E Government Persentase pengelolaan e government Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	2 Dokumen	320.000,00	APBD
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Pessel	5 Unit	82.000,00	APBD
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	12 Dokumen	50.000,00	APBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemda Pessel umlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Pessel	1 Dokumen	74.000,00	APBD
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegras	Kab. Pessel	55 Orang	25.476,00	APBD
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Pessel	12 Dokumen	62.000,00	APBD

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Pessel	41 OPD	69.000,00	APBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi				
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				
<u>Sub Kegiatan</u>					
Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Pessel	3 Dokumen	72.000,00	APBD
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Pessel	5 Laporan	84.000,00	APBD
J U M L A H				9.052.212,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

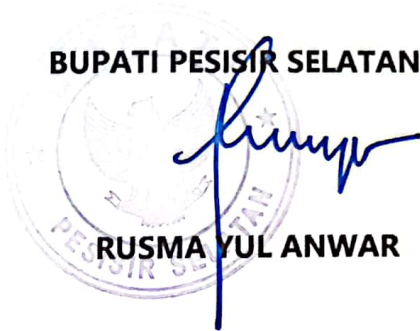
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.741.522.901,00							10.750.853.155,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.741.522.901,00							10.750.853.155,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.105.853.732,00							10.289.860.087,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.534.314.372,00						-	5.265.370.067,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	96.672.528,00			-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	98.987.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	96.672.528,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		98.987.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.548.377.375,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	3.903.215.112,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.463.528.192,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		3.809.881.011,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	84.849.183,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		93.334.101,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	267.935.692,00			-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	575.512.301,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6.349.533,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		6.984.486,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.204.194,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		14.645.033,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	29.608.165,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		32.568.982,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		5.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	6.160.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		7.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	208.213.800,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		208.213.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	190.300.000,00			-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat dan OPD	-	228.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	190.300.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	Masyarakat dan OPD		228.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	208.407.373,00			-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	229.248.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	139.584.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		153.542.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	68.823.373,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		75.705.710,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	222.621.404,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	230.047.544,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	57.910.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		57.910.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	74.261.404,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		81.687.544,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				81 Unit	30.450.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		30.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	-			100 %	1.334.683.809,00						-	1.952.990.020,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase informasi dan komunikasi publik dipublikasikan</i>	-			100 Persentase	1.334.683.809,00			-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	1.952.990.020,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>				2 Dokumen	80.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		88.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				12 Dokumen	235.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		294.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				3500 Dokumen	209.183.809,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		261.479.761,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				10 Layanan	760.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		708.960.259,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-			100 %	3.236.855.551,00						-	3.071.500.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan e governmnet dilingkup Kab.Pessisir Selatan	-			100 Persentase	3.236.855.551,00			-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	-	3.071.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	280.585.830,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				2 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		36.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				10 Unit	286.769.721,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				12 Dokumen	2.550.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		2.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						269.377.519,00							295.872.068,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	269.377.519,00						-	295.872.068,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	269.377.519,00			-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	-	295.872.068,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				120 Dokumen	61.371.244,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		67.508.368,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				140 Orang	82.795.275,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				12 Dokumen	56.310.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		67.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				41 Orang	38.901.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		42.791.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						143.291.650,00							165.121.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	143.291.650,00						-	165.121.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	143.291.650,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	165.121.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	68.291.650,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-		75.121.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						193.000.000,00							0,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	193.000.000,00						-	0,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	193.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkatan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				40 Perangkat Daerah	38.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						30.000.000,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	30.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur														
			Jumlah Infrastruktur Statistik				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 3 : Peningkata n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							9.741.522.901,00							10.750.853.155,00	